



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2023

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena atas bimbingan dan penyelenggaraan Ilahi-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

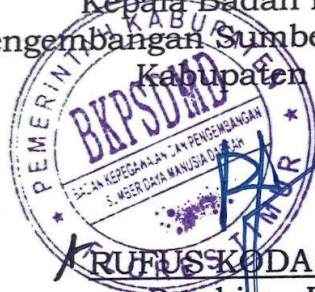
Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan Good Governance di lingkungan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, yang menjalankan tugas urusan pemerintahan di bagian Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrumen penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik.

Melalui Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BKPSDMD selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2023, yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan kami dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini. Semoga dapat bermanfaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai tugas dan karya kita sekalian.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



KRUFUSKODA TELUMA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Urusan kepegawaian dan urusan Pendidikan dan Pelatihan (pengembangan sumber daya manusia daerah). Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, sejumlah permasalahan serta sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur ditunjang oleh 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) sub kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap program dan kegiatan tersebut, secara umum telah mencapai target >80 % yang artinya sangat berhasil sedangkan realisasi keuangannya dari target **Rp. 5.603.744.798,-** terealisasi sebesar **Rp. 4.837.285.807,-** atau sebesar **86,32%** yang terdiri dari:

- 1. Plafon Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)** sebesar **Rp 3.119.810.459,-** (Tiga Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan ratus Sepuluh Ribu Empat ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), telah terealisasi **Rp 2.881.630.506,-** (Dua Miliar Delapn Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enasm Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Rupiah) atau **92,37%.**

2. Plafon Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung)

sebesar **Rp. 2.483.934.339,-** (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) telah terealisasi **Rp. 1.955.655.301,-** (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) atau **78,73 %**.

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



RUFUS KODA TELUMA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005

DAFTAR ISI

COVER	i
 Kata Pengantar	 ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi	5
1.5 Isu Strategis	8
1.6 Komposisi Pegawai	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 12
2.1 Perjanjian dan Penetapan Kinerja	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 21
3.1 Pengukuran Kinerja	21
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.3 Realisasi Anggaran	71
 BAB IV PENUTUP	 83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Capaian Kinerja Organisasi	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan	9
Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Agama	10
Tabel 2.1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2023	23
Tabel 3.2 Daftar Alokasi Formasi CASN Tahun 2023	39
Tabel 3.3 Jumlah Pelamar Seleksi Administrasi CASN T.A 2023	40
Tabel 3.4 Kelulusan Seleksi CASN Tahun 2023	40
Tabel 3.5 Rekapitulasi pelayanan MPP dan Penisunan T.A 2023	41
Tabel 3.6 Daftar Update, Peremajaan dan Penyajian Data Tahun 2023.....	43
Tabel 3.7 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	44
Tabel 3.8 Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2023	45
Tabel 3.9 Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	46
Tabel 3.10 Jumlah ASN berdasarkan Agama Tahun 2023	47
Tabel 3.11 Data Jabatan Struktural menurut Jabatan, Jumlah Jabatan Jabatan Terisi, Jabatan Lowong Keadaan 31 Desember Tahun 2023.....	48
Tabel 3.12 Data Jabatan Struktural Kabupaten Flores Timur yang terisi menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Keadaan 31 Desember 2023	48
Tabel 3.13 Rekapitulasi Pelayanan Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu Tahun 2023.....	48
Tabel 3.14 Rekapitulasi Pengurusan Mutasi Gaji/ berkala Tahun 2023	50
Tabel 3.15 Rekapitulasi Rekomendasi Pindah Keluar, Pindah Masuk, Mutasi antar OPD Tahun 2023	51
Tabel 3.16 Realisasi Pengurusan Mutasi Pangkat PMSD Tahun 2023	51
Tabel 3.17 Daftar Pelantikan Pejabat Struktural JPTP, Administrator & Pengawas Tahun 2023	52

Tabel 3.18 Daftar Rekapitulasi Mutasi dalam Jabatan Fungsional Tahun 2023	53
Tabel 3.19 Rekap Peserta Ujian Dinas & Penyesuaian Ijasah Tahap I Tahun 2023	54
Tabel 3.20 Jumlah Mahasiswa Tugas belajar Tahun 2023	56
Tabel 3.21 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2023	59
Tabel 3.22 Asn tersertifikasi tahun 2023	60
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	63
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023	71
Tabel 3.25 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam satu laporan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Jadi laporan ini memuat informasi kinerja dan informasi anggaran yang dikelola. Adapun informasi kinerja yang dimuat berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan

anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari SAKIP Satuan Kerja, SAKIP Unit Organisasi, hingga SAKIP Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKIP dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKIP secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 unit Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai bentuk tanggungjawab dan ketaatan terhadap aturan pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

- ✓ Mempertanggungjawabkan kinerja/pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta anggaran belanja guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).
- ✓ Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
- ✓ Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur;

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah maka kedudukan, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM.

c. Fungsi:

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah disesuaikan berdasarkan uraian tugas pokok masing-masing unsur penunjang pada unit

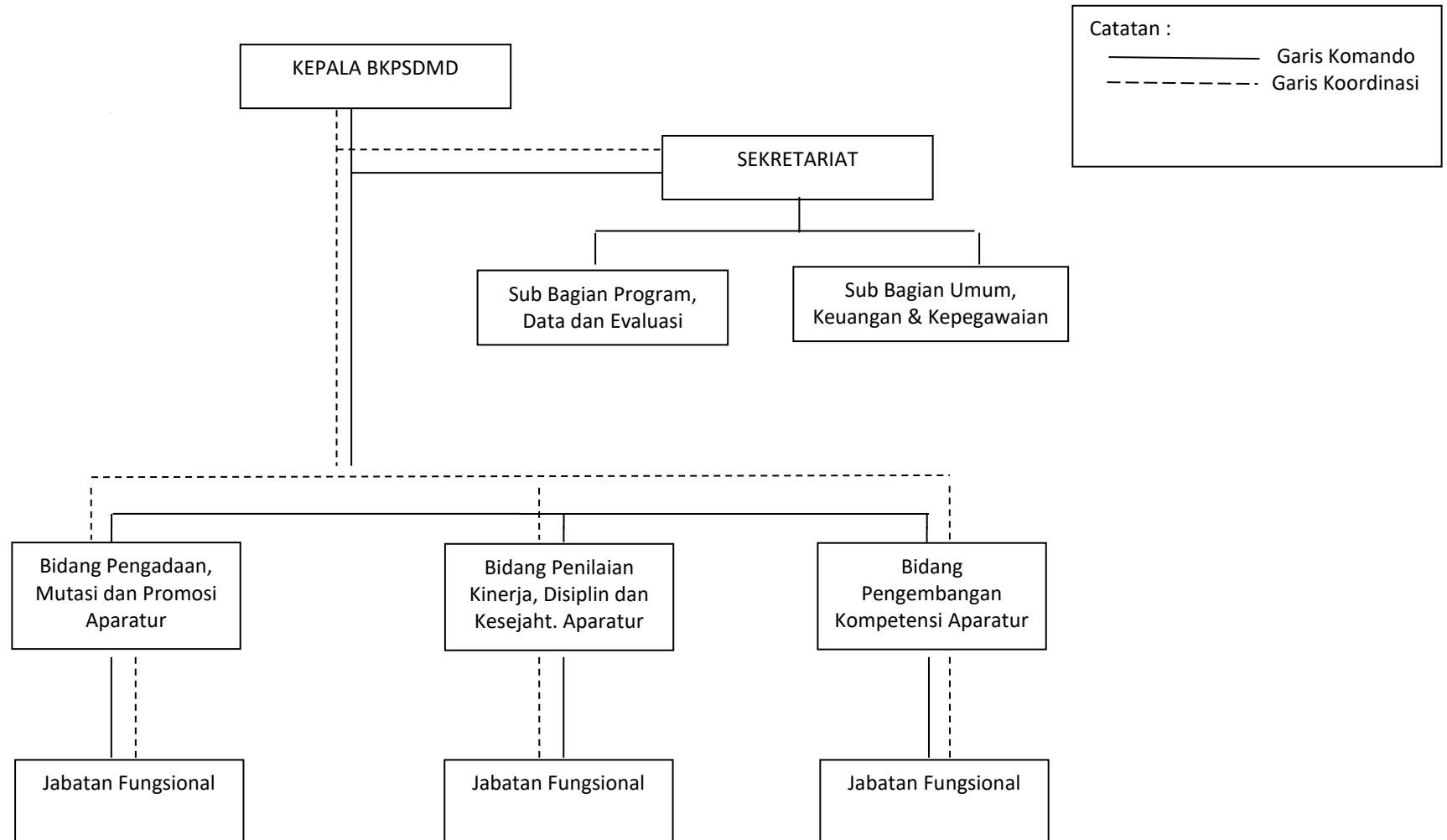
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

d. Struktur Organisasi:

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Bagan I

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur



1.5 Isu Strategis yang dihadapi OPD

Isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga Visi, Misi, Program dan Kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur antara lain:

1. Belum ada kesesuaian jabatan fungsional pasca Penyetaraan jabatan dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman jabatan.
2. Maraknya kasus pelanggaran disiplin oleh PNS, termasuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
3. Masih rendahnya tingkat pemahaman regulasi kepegawaian terutama oleh pengelola kepegawaian dari setiap OPD yang menyebabkan terhambatnya pengurusan hak-hak kepegawaian yang merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Pengangkatan ASN melalui jalur PPPK.
5. Pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi informasi, dimana penggunaan Teknologi Informasi menjadi kebutuhan dalam pelayanan Administrasi kepegawaian sehingga aspek SDM dan aspek sarana prasarana pendukung menjadi kendala utama dalam implementasi perubahan sistem kerja berbasis teknologi informasi.

1.6 Komposisi Pegawai.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur per 01 Januari 2023 adalah 38 orang, sedangkan per 31 Desember 2023 berjumlah 38 orang. Jumlahnya Tetap, tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	Keadaan 01 Januari 2023 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (Orang)
IV	4	5
III	28	27
II	5	6
I	1	0
Jumlah	38	38

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2023

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 01 Januari 2023 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (Orang)
S3	-	-
S2	3	3
S1	15	13
D III	4	3
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	15	18
SLTP	1	1
SD	-	-
Jumlah	38	38

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2023

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Keadaan 01 Januari 2023 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (Orang)
Laki-laki	29	27
Perempuan	9	11
Jumlah	38	38

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2023

Tabel 1.4
Keadaan Pegawai berdasarkan Agama:

Agama	Keadaan 01 Januari 2023 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (Orang)
Katolik	34	35
Islam	4	3
Protestan	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Jumlah	38	38

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2023

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.5 Isu Strategis yang dihadapi oleh SKPD
- 1.6 Komposisi Pegawai
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian dan Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian dan Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1.	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	5 Laporan	4 Laporan
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	1 Laporan	1 Laporan
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	41 Orang/bulan	38 Orang/bulan

		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12 Dokumen	12 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	2 Laporan	2 Laporan
		<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	2 Laporan	2 Laporan
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)</i>	1 Paket	1 Paket
		<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket
		<i>Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket
		<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1 Paket	1 Paket
		<i>Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket
		<i>Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan

		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)</i>		1 Unit
		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan
3	Peningkatan Kualitas Akses Pelayanan Kearsipan	<i>Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan
		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	5 Unit	5 Unit
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	4 Unit	2 Unit
		<i>Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	1 Unit
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	17 Unit	4 Unit
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	1 Unit
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>	5 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen

		<i>Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)</i>	7 Dokumen	7 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)</i>	4 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>	100 Orang	75 Orang
		<i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)</i>	100	50 Orang
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)</i>	20 Orang	20 Orang
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	20 Laporan	20 Laporan
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota (Orang)</i>	75 Orang	20 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.488.590	29.965.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.999.790	12.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.993.820	14.889.770
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.996.875	12.003.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.180.831.240	3.119.810.459
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	44.999.660	44.999.660
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.999.900	4.999.900
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.940	9.999.940
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.500.000	7.500.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Peyediaan Komponnen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	2.980.501	2.980.501
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.750	20.004.950
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.250	7.500.250
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	12.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.980	25.002.300
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.980.000	88.340.000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		25.700.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	29.460.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.800.000	9.600.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.668.841	14.043.305
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.950.000	2.950.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.994.800	25.986.490
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000	4.950.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.996.250	2.996.250
2.	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	29.999.830	25.001.750
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	299.999.790	669.999.360
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.999.910	39.998.750
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.999.700	19.999.700
		Pengelolaan Data Kepegawaian	30.000.000	16.224.250
		Mutasi dan Promosi ASN		
		Pengelolaan Mutasi ASN	29.988.1405	24.995.575
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	74.999.725	75.000.225
		Pengelolaan Promosi ASN	537.249.480	842.577.080
		Pengembangan Kompetensi ASN		
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	39.999.750	30.000.030
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	79.999.725	60.000.000
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	39.999.600	30.000.020

		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	34.999.125	29.999.665
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	24.999.800	20.000.073
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24.996.125	107.866.125
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.720	46.999.720
TOTAL			4.992.408.257	5.603.744.798

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran Pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) SKPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tolak ukur kinerja kebijakan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur haruslah didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Adapun untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu :

86-100%	= Baik Sekali (BS)
71-85%	= Baik (B)
56-70%	= Cukup (C)
0-55%	= Kurang (K)

Standar pengukuran kinerja tersebut digunakan dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur.

Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023, maka Pengukuran Kinerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1.	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang memadai dan berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Lap. Cap.Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Cap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	4 Laporan	4 Laporan	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	1 Laporan	1 Laporan	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)</i>	38 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan	107,89
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	100

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Laporan	1 Laporan	50
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	100
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1 Paket	1 Paket	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	100

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)</i>	1 Unit	4 Unit	400
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	5 Unit	4 Unit	80

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	2 Unit	2 Unit	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	1 Unit	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>	4 Unit	4 Unit	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	-	-
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	<i>Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	<i>Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)</i>	7 Dokumen	7 Dokumen	100

		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Pengelolaan Data Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Pengelolaan Mutasi ASN	<i>Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Pengelolaan Promosi ASN	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>	75 Orang	104 Orang	138
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)</i>	50 Orang	50 Orang	100
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	2	2	100

		Aparatur	(Dokumen)	Dokumen	Dokumen	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	20 Orang	20	100
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20 Laporan	25 Laporan	125
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20 Orang	20 Orang	100

Sasaran 1 : Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang memadai dan berkualitas

Sasaran ini dicapai melalui program rutin OPD, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100

2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	100

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100

4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	100

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 Dok	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 Dok	100

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	1 Laporan	50

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100

2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan barang Milik Daerah pada SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	100

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	100

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	1 Paket	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	1 Paket	100

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	100

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	100

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	100

5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	100

6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	100

7) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	100

8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	100

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	100

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	100

3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	4 unit	80,00

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara	2 unit	Jumlah Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara	2 unit	100

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Gedung kantor yang dipelihar/ direhab	1 unit	Jumlah Gedung kantor yang dipelihar/ direhab	1 unit	100

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihar/ rehabilitasi	4 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihar/ rehabilitasi	4 unit	100

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihar/ rehabilitasi	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihar/ rehabilitasi	1 unit	100

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini dicapai melalui 2 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu :

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Anggaran yang tersedia untuk Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp. 1.991.662.603,- dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.480.460.558,- atau 74,33%. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

Program ini diimplementasikan dalam 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dok	100

Untuk Tahun 2023 kegiatan Pelaksanaan Pengadaan ASN diawali dengan :

1. Penetapan Formasi

Penetapan Formasi CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Keputusan Menpan RB Nomor 546 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Daftar Alokasi Formasi CASN Tahun 2023

ASN	ALOKASI FORMASI
PPPK Teknis	347
PPPK Fungsional Kesehatan	225
PPPK Fungsional Guru	228
TOTAL ALOKASI	800

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dok	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dok	100

Tabel 3.3. Jumlah Pelamar Seleksi Administrasi CASN
Tahun 2023

ASN	Jumlah Pelamar	Seleksi Administrasi	
		MS	TMS
PPPK Teknis	1221	972	249
PPPK Fungsional Kesehatan	835	758	77
PPPK Fungsional Guru	520	520	-
TOTAL	2576	2250	326

Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan Seleksi untuk masing-masing kategori CASN (Guru, Medis dan Teknis) sesuai dengan jadwal yang telah di susun.

a. Penetapan NI PPPK

Tabel 3.4. Kelulusan Seleksi CASN Tahun 2023

CASN	JUMLAH LULUS
PPPK Teknis	230
PPPK Fungsional Kesehatan	195
PPPK Fungsional Guru	221
TOTAL	646

3) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7 Dok	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7 Dok	100

Target kinerjanya adalah terlaksananya proses administrasi bagi PNS yang memasuki masa purnabakti/pensiun (baik BUP, maupun janda duda) sebanyak 150 orang. Realisasinya di Tahun 2022 adalah terlayannya sebanyak 239 orang pensiunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Rekapitulasi pelayanan MPP dan Pensiun Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	SK Pensiun karena memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)	196
2.	SK Pensiun Janda/Duda	20
3.	SK Pensiun Anumerta	-
4.	SK Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	4
	Jumlah	220

Jadi pada tahun 2023 realisasi pelayanan administrasi bagi PNS yang mengalami purnabakti sebanyak 220 orang.

4) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok	100

Kegiatan penyajian data dan informasi ASN merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan pengolahan dan penyajian data ASN dengan beberapa butir kegiatan antara lain:

1. Melakukan update data kepegawaian pada sistem aplikasi yang digunakan dalam manajemen kepegawaian seperti SAPK.
2. Melakukan update data Kepegawaian pada Database lokal kepegawaian.
3. Mengelola kearsipan dokumen kepegawaian ASN.
4. Melakukan penyajian data ASN berupa Data Bulanan dan 1 (satu) Tahun.

Secara keseluruhan hasil kegiatan penyajian data dan informasi ASN diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6. Daftar Update, Peremajaan dan Penyajian
Data Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Volume
1.	Update Database Data Pangkat	637 Data
2.	Update Database Data JPT, Administrator dan Pengawas serta Kepala UPTD	75 Data
3.	Update Database Data Jabatan Fungsional	389 Data
4.	Update Database Data CPNS	655 Data
5.	Peremajaan Data pada SAPK untuk JPT, Administrator dan Pengawas serta Kepala UPTD	75 Data
6.	Peremajaan Data pada SAPK untuk Jabatan Fungsional	389 Dokumen
7.	Penyajian Data ASN Bulanan	1 file data
8.	Penyajian Rekap Data ASN Bulanan	1 file data
9.	Penyajian Data ASN 1 (satu) Tahun	1 file data
10.	Penyajian Rekap Data ASN 1 (satu) Tahun	1 file data
11.	Peremajaan data Unor	1 file data

Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Untuk itu dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem database

kepegawaian, melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi dan melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara manual.

Target kinerjanya adalah tersajinya data file PNS Kabupaten Flores Timur. Realisasinya adalah pada tahun 2023, tersaji 3 dokumen data kepegawaian yaitu : Data Profil ASN, TAKA digital dan Nominatif ASN Pemda.

Adapun gambaran pengelolaan data kepegawaian yang merupakan inti pelayanan pada pos kegiatan ini selama tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Data Nominatif ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Jumlah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 keadaan 31 Desember 2023 mencapai 5.344 orang terdiri dari PNS : 4346 orang dan PPPK sebanyak 998 orang.

Tabel 3.17. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

PNS			PPPK			TOTAL
Laki-laki	Perempuan	Jmlh	Laki-laki	Perempuan	Jmlh	5344
1822	2524	4346	367	611	998	

Tabel 3.8. Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2023

PNS					PPPK			
No	Golongan	Jenis Kelamin		Jmlh	Golongan	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan	
1	Gol. I	15	2	17	V	10	0	10
2	Gol. II	320	367	687	VIII	35	110	145
3	Gol. III	1121	1927	3048	IX	332	462	794
4	Gol. IV	366	228	594	X	10	39	49
Total		1822	2524	4346	Total	387	611	998

Tabel 3.9. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

PNS					PPPK		
No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jmlh	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	14	5	19	-	-	-
2	SLTP	27	5	32	-	-	-
3	SLTA	437	314	751	10	0	10
4	D-1	2	15	17	-	-	-
5	D-II	69	45	114	-	-	-
6	D-III	190	748	938	35	110	145
7	S1/D-IV	1028	1358	2386	332	464	796
8	S2	56	32	88	10	37	47
9	S3	1	0	1	-	-	-
Total		1824	2522	4346	387	611	998

Tabel 3.10. Jumlah ASN berdasarkan Agama Tahun 2023

PNS					PPPK		
No	Agama	Jenis Kelamin		Jmlh	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	211	327	538	41	78	119
2	Katolik	1573	2132	3705	345	527	827
3	Kristen	35	61	96	1	5	6
4	Hindu	3	4	7	-	1	1
5	Budha	-	-	-	-	-	-
Total		1822	2524	4346	387	611	998

Data Jabatan Struktural

Tabel 3.11. Data Jabatan Struktural menurut Jabatan, Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi, Jabatan Lowong Keadaan 31 Desember Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Terisi	Lowong
1	JPT	IIa	1	1	-
		IIb	35	26	9
	Jumlah 1		36	27	9
2	Administator	IIIa	66	58	8
		IIIb	117	101	16
	Jumlah 2		183	159	24
3	Pengawas	IVa	218	156	62
		IVb	122	100	22
	Jumlah 3		340	256	84
Total			559	442	117

Tabel 3.12. Data Jabatan Struktural Kabupaten Flores Timur yang terisi menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Keadaan 31 Desember 2023

No	Jabatan		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	JPT	IIa	1	-	1
		IIb	24	2	26
	Jumlah 1		25	2	27
2	Administator	IIIa	54	4	58
		IIIb	78	23	101
	Jumlah 2		132	27	159
3	Pengawas	IVa	116	40	156
		IVb	53	47	100
	Jumlah 3		169	87	256
Total			326	116	442

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dok	100

Target kinerjanya adalah terpenuhinya PNS yang memiliki administrasi kepegawaian yang lengkap dalam hal ini berupa administrasi Kartu pegawai, Kartu Istri, Kartu suami dan Kartu Tabungan Pensiunan. Realisasinya sebanyak 4 Dokumen yang diproses dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.13. Rekapitulasi Pelayanan Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu Tahun 2023

No	Jenis Usulan	Jumlah Usul	Sudah diproses	Belum Proses
1.	Penerbitan Karpeg	-	-	-
2.	Penerbitan Karis	30	30	-
3.	Penerbitan Karsu	30	30	-
4.	Penerbitan Taspen			-
	Jumlah	60	60	-

Selain melaksanakan tugas pengurusan karpeg, taspen dan karis/karsu, pada kegiatan ini juga melekat berbagai sub kegiatan tambahan yang menjadi tupoksi BKPSDMD dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun sub kegiatan tambahannya berupa mengurus mutasi gaji/berkala PNS Pemerintah kabupaten Flores Timur. Adapun realisasi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

Tabel 3.14. Rekapitulasi Pengurusan Mutasi Gaji/ berkala Tahun 2023

No	Waktu (TMT)	Jumlah
1	Januari	265
2	Februari	89
3	Maret	410
4	April	128
5	Mei	5
6	Juni	14
7	Juli	11
8	Agustus	8
9	September	17
10	Oktober	73
11	November	15
12	Desember	131
	TOTAL	1166 SK

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dok	100

Tabel 3.15. Rekapitulasi Rekomendasi Pindah Keluar, Pindah Masuk, Mutasi antar OPD Tahun 2023

No	Uraian Sub kegiatan	Jumlah	Ket
1	Mutasi PNS antar OPD lingkup Pemkab Flotim - SK Mutasi Kerja	94	
2	Rekomendasi Pindah Masuk	14	
3	Rekomendasi Pindah Keluar	21	
	TOTAL	129 SK	

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Pengelola na Kenaikan Pangkat ASN	4 Dok	Jumlah Pengelola na Kenaikan Pangkat ASN	4 Dok	100

Target kinerjanya adalah terwujudnya administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,. Realisasinya sebanyak total 637 orang dengan diprosesnya usulan kenaikan pangkat sebanyak 763 berkas dan Mutasi PNS sebanyak 129 orang (Mutasi PNS antar OPD lingkup Pemkab Flotim, pindah masuk dan pindah Keluar) Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16. Realisasi Pengurusan Mutasi Pangkat PNSD Tahun 2023

No	Uraian	Usulan	BTL/ TMS	Disetuju/ MS	Ket
1	Kenaikan Pangkat April	517	122	395	
2	Kenaikan Pangkat Oktober	246	4	242	
	Total	763	126	637	

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 usulan kenaikan pangkat yang tidak dapat diproses atau dikenal dengan istilah BTL/TMS lebih sedikit dibandingkan tahun 2022. Alasan Batal (BTL) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah : Lebih Banyak pada Guru yang belum memiliki sertifikat Pendidik dan kasus lain PI yang sertifikat akreditasi institusinya tidak memenuhi persyaratan.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dok	100

Target kinerjanya adalah jumlah jabatan yang terisi sesuai kebutuhan jabatan yang lowong. Realisasinya adalah : Pada Tahun 2023 hanya dilaksanakan Seleksi Terbuka Eselon IIA (Sekda). Kegiatan ini dilaksanakan pada September s.d Oktober 2023.

Tabel 3.17. Daftar Pelantikan Pejabat Struktural JPTP, Administrator & Pengawas Tahun 2023

No	Tgl Pelantikan	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	20 Januari 2023	JPTP (Pj.Sekda)	II.a	1 orang
2	11 Agustus 2023	JPTP Administrator Administrator	II.b III.a III.b	12 orang 7 orang 3 orang

	18 Agustus 2023	Administrator Administrator Pengawas Pengawas	III.a III.b IV.a IV.b	1 orang 2 orang 14 orang 10 orang
	25 Agustus 2023	Administrator Administrator Pengawas	III.a III.b IV.a	1 orang 1 orang 3 orang
	22 Desember 2023	JPTP (Sekretaris Daerah)	II.a	1 orang
	Jumlah			56 orang

Sedangkan Rekapitulasi terkait Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Daftar Rekapitulasi Mutasi dalam Jabatan Fungsional Tahun 2023

No	Jenis Mutasi	Jumlah	Ket
1	Pengangkatan Pertama Kali	228 orang	
2	Pengangkatan Kembali	4 orang	
3	Kenaikan/Perpindahan Jabatan	132 orang	
4	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	25 orang	
5	Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK	649 orang	
6	Total	1038 orang	

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dok	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dok	100

Target kinerja adalah Terlaksananya Ujian Dinas baik Ujian Dinas Tk.I, Ujian Dinas Tk.II, dan Ujian Penyesuaian Ijasah Bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Realisasinya adalah terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I dan ujian Penyesuaian Ijasah sebanyak 1(satu) kali pelaksanaan kegiatan dengan pembebanan pada Anggaran BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, dengan jumlah peserta 50 orang. Berikut gambaran realisasi peserta kegiatan ini dari masing-masing tingkatan :

Tabel 3.19. Rekap Peserta Ujian Dinas & Penyesuaian Ijasah
Tahap I Tahun 2023

No	JENIS UJIAN	JUMLAH USULAN	HADIR (Mengikuti Ujian)	Keterangan
1.	UJIAN DINAS			1. 1 Peserta Ujian Dinas Tingkat I, TMS.
	Tingkat I	35	34	
	Tingkat II	5	4	

2.	PENYESUAIAN IJAZAH			2. Peserta yang hadir semuanya lulus dan sudah memperoleh Sertifikat.
	S1	13	11	
	D3	-	-	
	D2	-	-	
	SLTA-PAKET C	1	-	
	SLTP-PAKET B	1	1	
	TOTAL	55	50	

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	75 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	103 Orang	137,33

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta mengembangkan kepribadian aparatur yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan kesempatan kepada seluruh PNS untuk melanjutkan pendidikannya baik melalui sistem Ijin Belajar maupun Tugas Belajar. Sasaran utamanya adalah seluruh PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pendasaran kegiatan ini adalah sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 20022 tentang Tugas Belajar bagi PNS Daerah. Pada tahun 2023 ini, Target kinerjanya adalah meningkatkan jenjang pendidikan

PNS dengan melayani semua proses kepegawaian menyangkut permohonan Tugas Belajar, Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil maupun Ikatan Dinas sebanyak 75 orang. Realisasinya dapat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.20 Jumlah Mahasiswa Tugas belajar Tahun 2023

No.	Bidang Minat/Kompetensi	Tugas Belajar	Ijin Belajar	Ikatan Dinas
1.	Tenaga Kesehatan	22		-
2.	Tenaga Guru	15		-
3.	Tenaga Teknis Lainnya	66		-
	Jumlah	103 orang		-

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah ASN ayng Mendapat kan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional	50 Orang	Jumlah ASN ayng Mendapat kan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional	50 Orang	100

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dok	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dok	100

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	100

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan/reward bagi PNS yang menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Adapun untuk mencapai target kegiatan ini, sebelumnya melewati tahapan uji petik di lapangan sebelum diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia. Kegiatan Pemberian Satya lencana Karya Satya bagi PNS merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan 3 (tiga) jenis penghargaan yaitu bagi PNS yang memiliki masa kerja 10,

20 dan 30 tahun. Satya lencana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat, motivasi dan dedikasi kinerja PNS, serta menimbulkan kebanggaan karena pengabdian mereka dihargai oleh negara. Lebih jauh, PNS yang menerima penghargaan ini seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi rekan-rekan PNS di lingkungan SKPD mereka masing-masing. Tahun 2023 usulan sebanyak 20 orang PNS yang akan Menerima Tanda Kehormatan satya Lancana karya Satya di tahun 2024.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	125

Sesuai amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance)

melalui pengukuran persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin PNS.

Target kinerjanya adalah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang maupun berat sebanyak 20 kasus. Realisasinya adalah selama tahun 2023 terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 25 kasus (125%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21. Tabel Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Tahun 2023

No.	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Keterangan
1	18 Kasus PNS	15 Kasus Pembinaan Internal Oleh Atasan Langsung 3 kasus telah dilakukan pemeriksaan Inspektorat
2	3 Kasus PNS	4 Kasus PNS diberhentikan sementara
3	1 Kasus PNS	1 Kasus PNS dalam proses usulan Pemberhentian dengan hormat alasan sakit.
4	1 Kasus PPPK	1 Kasus PPPK diberhentikan dengan hormat tidak atas Permintaan sendiri sebagai PPPK
5	1 Kasus PNS	1 Kasus PNS diberikan Ijin Perceraian
	Sub Total	- 24 ASN
No.	Jumlah PNS yang Tersangkut kasus Tindak Pidana Korupsi	Keterangan
1.	1 PNS	1 PNS dikenakan Penjatuhan Sanksi Administratif Kepegawaian berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS(Karena Kasus Tipikor)
	Sub Total	1 PNS
	TOTAL	25 PNS

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Anggaran yang tersedia untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp. 46.999.720,- dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 46.666.680,- atau 99,29%. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lengkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota	20 Orang	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota	24 Orang	120

Tabel 3.22. Tabel Asn tersertifikasi tahun 2023

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Jenis sertifikasi (yang diikuti)
1	ALAIDA INA LAMABLAWA	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
2	CHRISTINA YULIANA OSE BETAN	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
3	YULIUS EMANUEL DOSINAEN	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI

4	IDA BENGGA TUPEN	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5	YOHANES DJUANG SAKERA	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
6	PETRONELA PERADA MANGU	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
7	AMARIUS ALI	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
8	KASMIRUS SETU KOPONG	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
9	IGNASIUS TOBI EBAK	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
10	HANA IYDIA BULAKH	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
11	PETRONELA PERADA MANGU	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
12	KATARINA MARIA IGON	PENGELOLA PERUMAHAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
13	YOHANES BALAKOTEN	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
14	PETRUS PAULUS SANI KEDANG	ANALIS KEPEGAWAIAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
15	SUSANA SINA	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
16	MARIA YANUARIAS LAJU RURON	KASI BIMAS	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
17	FERY KRISTIANTI	KASUBAG UMPEG	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
18	MAGDALENA MAGI LEWOTAN	ANALIS KEPEGAWAIAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
19	KRISTIANA	ANALIS SDMA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI

20	CAECILIA	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
21	MARIA ANJELIN JAWA LEIN	PELAKSANA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
22	HUZAIFAH SYARIFUDIN,SE	ANALIS SDMA AHLI MUDA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
23	MARIA GORETTY LAU KERANS,SE	ANALIS SDMA AHLI MUDA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI
24	MARSELINUS AIMA	PENYULU PERTANIAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dari hasil analisis diatas, diketahui bahwa :

1. Capaian Kinerja Program/ Kegiatan :

Sasaran	Uraian Program	Capaian Realisasi Kinerja (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	105,19
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	133,25
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	120,00
Total Capaian Realisasi Kinerja		119,61

Dari hasil analisis Capaian Kinerja Sasaran diatas, diketahui capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah :
119,61 %

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
1.	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2 dok	2 dok	100	8 dok
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1 dok	1 dok	100	1 dok
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7 dok	100	4 lap	4 lap	100	7 lap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)			1 lap	1 lap	100	5 lap
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			38 Orang/bulan	41 Orang/bulan	107,89	38/14 orang bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			12 dok	12 dok	100	12 dok

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			2 lap	1 lap	50	2 lap
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1 dok	1 dok	100	1 dok
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			2 lap	2 lap	100	8 lap
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)			1 dok	1 dok	100	2 dok
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	1 paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	14 jenis	100	2 Paket	2 Paket	100	8 paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)			2 Paket	2 Paket	100	8 paket

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	29 jenis	100	1 Paket	1 Paket	100	4 paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	37500 lembar	100	2 Paket	2 Paket	100	8 paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)</i>	1 jenis	100	1 dok	1 dok	100	8 dok
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	1100 porsi	100	12 lap	12 lap	100	12 lap
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	16 kali	106	12 lap	12 lap	100	12 lap
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)</i>			1 Unit	4 Unit	400	8 unit
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	100 lembar	100	12 Lap	12 Lap	100	12 lap
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)</i>	12 bln	100	12 Lap	12 Lap	100	48 lap
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang</i>	1 orang	100	12 Lap	12 Lap	100	48 lap

			<i>disediakan (laporan)</i>						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	4 Unit	80	5 Unit	4 Unit	80	6 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	12 jenis	100	2 Unit	2 Unit	100	1 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	4 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>	3 jenis	100	4 Unit	4 Unit	100	4 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>			1 Unit	-	-	2 unit
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>	698 orang 344 orang 74 formasi	140 69 149	2 Dok	2 Dok	100	5 dok

		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)			2 Dok	2 Dok	100	8 dok
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	239 orang	159	7 Dok	7 Dok	100	28 dok
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7078 file	122	3 Dok	3 Dok	100	60 dok
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	2410 Orang	101	4 Dok	4 Dok	100	20 dok
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)			2 Dok	2 Dok	100	10 dok
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	2410	101	4 Dok	4 Dok	100	16 dok
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	350 orang/Dok	117	3 Dok	3 Dok	100	12 dok
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	55 orang	55	2 Dok	2 Dok	100	8 dok

		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>	90 orang	90	75 Orang	104 Orang	138	400 orang
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)</i>			50 orang	50 orang	100	400 orang
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>			2 Dok	2 Dok	100	8 dok
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)</i>	20 Orang	100	20 Orang	-	-	80 orang
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	21 kasus	105	20 Lap	25 Lap	125	80 lap
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)</i>			20 Orang	20 Orang	100	280 orang

Dari analisis perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 diketahui bahwa pada umumnya sama dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang dilakukan

Dari hasil analisis kinerja diatas, didapat disimpulkan :

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

1. Memaksimalkan seluruh kompetensi aparatur yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar
2. Memaksimalkan seluruh perangkat sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja

1. Perencanaan Target yang terlalu tinggi, yang kemudian dukungan dana kurang sehingga sulit mencapai target yang telah direncanakan tersebut.
2. Kabupaten Flores Timur belum memiliki badan diklat berakreditasi sesuai persyaratan untuk penyelenggaraan diklat sehingga peserta diklat dari Kabupaten Flores Timur harus mengikuti kegiatan di lembaga lain yang terakreditasi.
3. Anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga menjadi beban anggaran pada BKPSDMD Kabupaten Flores Timur termasuk untuk mentor/pembimbing dari peserta diklat pim.

3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan kerjasama dengan pihak provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini para assesor dalam rangka koordinasi teknis yang lebih matang dalam pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Flores Timur.
2. Peningkatan fasilitas pendukung dalam hal ini peralatan elektronik dan gedung yang layak untuk pelaksanaan seleksi.
3. Penambahan anggaran yang lebih agar kuota peserta meningkat.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebagai berikut :

1. Sumber daya keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Kabupaten Flores Timur belum tersedia cukup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 program 13 kegiatan 42 Sub

Kegiatan, dengan hasil analisisnya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

URUTAN PENCAPAIAN N KINERJA	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	133,25
2	Program Kepegawaian Daerah	105,19
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	120,00

4. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki anggaran belanja dan realisasi sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.565.082.475	3.310.158.569	92,85
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.858.470	68.763.725	99,86
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.965.000	29.879.275	99,71
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.889.770	14.880.750	99,94

1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.003.700	12.003.700	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.179.810.119	2.941.630.106	92,51
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.810.459	2.881.630.506	92,37
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	44.999.660	44.999.600	100,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.999.840	14.998.500	99,99
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.999.900	4.999.900	100,00
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.940	9.998.600	99,99
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100,00
4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.500.000	7.500.000	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.728.001	176.292.368	99,75
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.980.501	2.682.000	89,98
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.004.950	20.004.500	100,00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.250	7.499.500	99,99
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00

5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.002.300	25.002.000	100,00
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	100,00
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	100,00
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.340.000	88.204.368	99,85
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.700.000	24.758.000	96,33
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.700.000	24.758.000	96,33
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	40.560.000	38.856.860	95,80
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.460.000	27.756.860	94,22
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000	9.600.000	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.926.045	37.359.010	73,36
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.043.305	9.518.010	67,78
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.950.000	2.950.000	100,00
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.986.490	24.241.000	93,28
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000	650.000	13,13

8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.996.250		0,00
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.991.662.603	1.480.460.558	74,33
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	771.223.810	764.530.283	99,13
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.001.750	24.229.230	96,91
9.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	669.999.360	664.285.553	99,15
9.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.998.750	39.998.750	100,00
9.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.999.700	19.794.500	98,97
9.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	16.224.250	16.222.250	99,99
10	Mutasi dan Promosi ASN	942.572.880	512.820.433	54,41
10.1	Pengelolaan Mutasi ASN	24.995.575	24.034.500	96,16
10.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.225	74.532.000	99,38
10.3	Pengelolaan Promosi ASN	842.577.080	414.253.933	49,17
11	Pengembangan Kompetensi ASN	120.000.050	116.887.442	97,41
11.1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	30.000.030	27.348.550	91,16
11.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.000.000	59.999.000	100,00

11.3	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	30.000.020	29.539.892	98,47
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	157.865.863	86.222.400	54,62
12.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.999.665	29.877.100	99,59
12.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20.000.073	19.998.500	99,99
12.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	107.866.125	36.346.800	33,70
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46.999.720	46.666.680	99,29
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	46.999.720	46.666.680	99,29
13.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	46.999.720	46.666.680	99,29
	TOTAL BELANJA	5.603.744.798	4.837.285.807	86,32

Tabel 3.25. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	-	5.603.744.798	-	4.837.285.807	119,61	86,32
	KEPEGAWAIAN	-	5.556.745.078	-	4.790.619.127	119,22	86,21
Terwujudnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		3.565.082.475		3.310.158.569	133,25	92,85
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		68.858.470		68.763.725	100,00	99,86
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	29.965.000	2	29.879.275	100,00	99,71
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	12.000.000	1	12.000.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	14.889.770	4	14.880.750	100,00	99,94
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.003.700	1	12.003.700	100,00	100,00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.179.810.119		2.941.630.106	85,96	92,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38	3.119.810.459	41	2.881.630.506	107,89	92,37
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	44.999.660	12	44.999.600	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2	15.000.000	1	15.000.000	50,00	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		14.999.840		14.998.500	100,00	99,99
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	4.999.900	1	4.999.900	100,00	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	9.999.940	2	9.998.600	100,00	99,99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.500.000		7.500.000	100,00	100,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	7.500.000	1	7.500.000	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		176.728.001		176.292.368	100,00	99,75
	Peyediaan Komponnen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1	2.980.501	1	2.682.000	100,00	89,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	20.004.950	2	20.004.500	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	7.500.250	2	7.499.500	100,00	99,99

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	12.000.000	1	12.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	25.002.300	2	25.002.000	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	900.000	1	900.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	20.000.000	12	20.000.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	88.340.000	12	88.204.368	100,00	99,85
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25.700.000		24.758.000	400,00	96,33
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	25.700.000	4	24.758.000	400,00	96,33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	40.560.000	36	38.856.860	100,00	95,80
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.500.000	12	1.500.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	29.460.000	12	27.756.860	100,00	94,22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	9.600.000	12	9.600.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.926.045		37.359.010	80,00	73,36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	14.043.305	5	9.518.010	100,00	67,78

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2.950.000	2	2.950.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	25.986.490	1	24.241.000	100,00	93,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	4.950.000	4	650.000	100,00	13,13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	2.996.250	0	-	-	-
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah		1.991.662.603		1.480.460.558	105,19	74,33
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		771.223.810		764.530.283	100,00	99,13
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	25.001.750	2	24.229.230	100,00	96,91
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	669.999.360	2	664.285.553	100,00	99,15
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7	39.998.750	7	39.998.750	100,00	100,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	19.999.700	3	19.794.500	100,00	98,97
	Pengelolaan Data Kepegawaian	4	16.224.250	4	16.222.250	100,00	99,99

	Mutasi dan Promosi ASN		942.572.880		512.820.433	100,00	54,41
	Pengelolaan Mutasi ASN	2	24.995.575	2	24.034.500	100,00	96,16
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	75.000.225	4	74.532.000	100,00	99,38
	Pengelolaan Promosi ASN	3	842.577.080	3	414.253.933	100,00	49,17
	Pengembangan Kompetensi ASN		120.000.050		116.887.442	112,44	97,41
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	30.000.030	2	27.348.550	100,00	91,16
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	75	60.000.000	103	59.999.000	137,33	100,00
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	50	30.000.020	50	29.539.892	100,00	98,47
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		157.865.863		86.222.400	108,33	54,62
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	29.999.665	2	29.877.100	100,00	99,59
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20	20.000.073	20	19.998.500	100,00	99,99
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	107.866.125	25	36.346.800	125,00	33,70

	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		46.999.720		46.666.680	120,00	99,29
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	46.999.720	-	46.666.680	120,00	99,29
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		46.999.720		46.666.680	120,00	99,29
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	20	46.999.720	24	46.666.680	120,00	99,29

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 5.603.744.798,-** untuk membiayai 3 Program, 13 Kegiatan, 42 Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp. 4.837.285.807,-** atau menunjukkan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar **86,32 %**.

Dari realisasi keuangan diatas, diketahui bahwa :

Sasaran	Uraian Program	Capaian Realisasi Keuangan (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,85
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	74,33
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	99,29

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan dana tahun 2023 dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sarasannya. Evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk peningkatan kinerja BKPSDMD Flores Timur kedepannya. Namun secara keseluruhannya BKPSDMD Kabupaten Flores Timur telah berupaya melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Komitmen dan dedikasi yang kuat mulai dari unsur pimpinan sampai level staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan telah dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan.

Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi secara menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang masuk kelompok Indikator Kinerja besaran capaiannya rata-rata diatas 90 % dan sesuai dengan pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori **Sangat Berhasil**.
2. Capaian kinerja keuangan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, secara menyeluruh tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai **86,32 %**. Kondisi kinerja keuangan tersebut, sesuai pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka capaian kinerja keuangan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 juga dapat dikatakan masuk kategori **Berhasil**.

4.2 SARAN

Dari uraian capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023 serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2022, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik.

Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja kedepan khususnya yang bersifat internal OPD. Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal

SKPD akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens dan perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai upaya perubahan menuju perbaikan, diantaranya :

1. Komitmen dalam upaya pengembangan database kepegawaian yang lebih baik yakni secara online sehingga keakuratan dan keamanan data PNS dapat terlindungi dan bersifat transparansi bagi publik.
2. Diperlukan terobosan baru, kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran sehingga menjadi lebih efektif dan lebih cepat menjawab kebutuhan organisasi.
3. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dapat dilakukan dengan lebih intensif terutama dalam menghadapi isu-isu aktual maupun kebijakan aktual di bidang kepegawaian mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta pihak lainnya.
4. Penyempurnaan mekanisme promosi jabatan yang terbuka dalam rangka pengisian jabatan dsbnya guna memperoleh SDM Aparatur yang profesional, bersih dan berkompeten.
5. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan kepegawaian yang aktual guna meningkatkan pemahaman PNS untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pada PNS.
6. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian agar tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban akan keberhasilan maupun kegagalan dari Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian tujuan dan sasaran bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah.

Melalui laporan kinerja instansi pemerintah dapat pula diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Kabupaten Flores Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) unit Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini dibuat, sekiranya bermanfaat untuk semua pihak, terima kasih.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



KRUFUS KODA TELUMA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005